



Buletin Parlementaria

Nomor 1013/IV/VI/2018 • Juni 2018

Pimpinan DPR Gelar Open House Lebaran



9 772614 339005

Pertamina Mutlak Siagakan BBM Premium

TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN



Foto: Jaka/hr

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo didampingi isterinya menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat *open house* di rumah dinas di Widya Chandra, Jakarta

Pimpinan DPR Gelar *Open House* Lebaran

Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah dimaknai sebagai hari kemenangan bagi umat Islam di seluruh dunia. Idul Fitri juga dimaknai sebagai momentum untuk menguatkan silaturahmi dengan keluarga, kolega, dan masyarakat. Momentum ini pun dimanfaatkan Pimpinan DPR RI dengan menggelar *open house* di kediaman masing-masing, guna meningkatkan tali silaturahmi.



Foto: Jaka/hr

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berfoto bersama wartawan saat *open house* di rumah dinas



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menggelar *open house* di rumah dinas di kawasan Kuningan, Jakarta

Foto: Andri/7hr



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si. (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),

Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),

Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Suciati, S.Sos, Sofyan Efendi

SEKRETARIS REDAKSI

Hasri Mentari, Guntur Dewanto

ANGGOTA REDAKSI

Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH, Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega, Taufan Syahrulli

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER

Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI

Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher, Gerald Opie

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,

e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah,

Fathurrahman, Abdul Kahfi, S. Kom,

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

Sjaefudin, S.Sos

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO

DILUANG TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menggelar acara *open house* di rumah dinas, di Kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (15/6). Selain Ketua DPR RI, Pimpinan DPR RI lain yang juga menyelenggarakan *open house* yakni Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto dan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto.

Dari pantauan Tim Parlementaria, sejumlah kalangan tampak hadir di kediaman Bamsuet, sapaan akrab Ketua DPR RI itu untuk bersilaturahmi dengan nuansa keakraban, mulai dari menteri, politisi, duta besar negara sahabat, selebriti hingga masyarakat umum. Menteri Kabinet Kerja yang terlihat diantaranya Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Menteri ESDM RI Ignasius Jonan, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly.

Sejumlah Anggota DPR RI juga hadir, seperti Nasir Djamil (F-PKS), Mukhamad Misbakhun (F-PG), Azis Syamsudin (Ketua Banggar/F-PG), Arsul Sani (F-PPP), John Kenedy Azis (F-PG), Dave Laksono (F-PG), dan Adisatrya Suryo

Sulisto (F-PDI Perjuangan).

Bamsuet mengatakan Idul Fitri merupakan ikatan silaturahmi untuk kembali menemukan fitrah Ramadan. Ia juga tak menampik dalam kunjungan silaturahmi ke kediaman sejumlah tokoh politik nasional, momentum ini dimanfaatkan para elite untuk membahas situasi politik terkini.

"Hari ini kita juga mengunjungi para senior-senior untuk bersilaturahmi dan meminta maaf. Obrolan kecil soal politik pasti ada, dan tampaknya Lebaran kali ini banyak dimanfaatkan para elite untuk berbincang-bincang mengenai situasi politik saat ini dan rencana ke depan," ungkap Bamsuet di sela-sela menerima tamu.

Politisi Partai Golkar itu memaparkan, obrolan politik tersebut berkaitan dengan Pilpres 2019, mengingat pendaftaran Capres dimulai pada bulan Agustus mendatang. Ia juga menuturkan, baginya, Idul Fitri tahun ini cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan jabatannya sebagai Pimpinan DPR, ia tak ingin ada tokoh-tokoh politik yang terlewatkan



Foto: Eno/hr

Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menerima Sekjen DPR RI Indra Iskandar (tengah) saat *open house* di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta

untuk bersilaturahmi. Di hari yang fitri, Bamsuet juga memberikan santunan kepada anak yatim.

Usai menjalankan sholat Ied, Bamsuet terlebih dahulu berkunjung ke Istana Bogor untuk bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo. Setelah itu, ia mengunjungi kediaman Presiden RI ke 5 Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan terakhir

kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Di hari yang sama, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon juga menggelar *open house* di rumah dinas di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (15/6). Nampak hadir sejumlah pejabat negara, dan pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI hadir di kediaman politisi Partai Gerindra itu. Suasana silaturahmi pun berlangsung

dengan penuh keakraban.

Masih pada hari yang sama, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto beserta keluarga menggelar *open house* Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, di rumah dinas di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. *Open house* yang diadakan usai sholat Shalat Ied itu, itu dihadiri sejumlah tamu yang terdiri dari sesama politisi, sahabat, keluarga dan handai taulan.

“Agus Hermanto dan keluarga besar mengucapkan Minal Aidzin Wal Faizin, mohon maaf lahir bathin. Tentunya banyak kesalahan-kesalahan saya, dan memohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya,” ujar Agus saat menerima tamu, dengan didampingi keluarganya.

Politisi Partai Demokrat itu

Idul Fitri merupakan ikatan silaturahmi untuk kembali menemukan fitrah Ramadan. Ia juga tak menampik dalam kunjungan silaturahmi ke kediaman sejumlah tokoh politik nasional, momentum ini dimanfaatkan para elite untuk membahas situasi politik terkini.



Foto: Antri/hr

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima Deputy Persidangan Setjen DPR RI Damayanti saat *open house* di rumah dinas di Kawasan Kuningan, Jakarta

mengatakan, makna Idul Fitri sebagai waktu seluruh umat Muslim untuk bersyukur, serta meningkatkan keyakinan dan amal ibadah di bulan yang penuh rahmat ini. “Kita harus memaknai setiap Ramadan sesuai dengan fitrahnya, karenanya di bulan Ramadan kita harus lebih baik lagi dalam beribadah,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto beserta keluarga menggelar *open house* dikediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6). Utut mengatakan ini merupakan lebaran pertama kalinya sebagai Pimpinan DPR, namun tidak ada perbedaan yang mencolok dalam perayaan Idul Fitri kali ini. Sama

seperti rutinitas di tahun-tahun sebelumnya, Grandmaster (GM) Catur

Makna Idul Fitri sebagai waktu seluruh umat Muslim untuk bersyukur, serta meningkatkan keyakinan dan amal ibadah di bulan yang penuh rahmat ini. Kita harus memaknai setiap Ramadan sesuai dengan fitrahnya, karenanya di bulan Ramadan kita harus lebih baik lagi dalam beribadah

Indonesia ini selalu membuka pintu silaturahmi di hari raya nan fitri.

Acara yang digelar dari pukul 11.00 siang hingga sore hari dihadiri sejumlah tamu yang terdiri dari rekan sejawat Anggota DPR, akademisi, keluarga dan kerabat terdekat. Semua tamu yang hadir berbaur menjadi satu, menciptakan suasana keakraban.

Berdasarkan pantauan Tim Parlemenaria, tampak hadir Anggota Komisi III DPR RI Ichsan Soelistio, Anggota Komisi IV DPR RI Sudin, Anggota Komisi VI DPR RI Nyoman Dhamantra, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, Deputy Persidangan Setjen DPR Damayanti, dan beberapa pecatur Indonesia. ■ ann,man/sf



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

Foto: Jaka/hr

Ketua DPR Prihatin Tenggelamnya Kapal Sinar Bangun

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo prihatin dan turut berduka cita atas musibah tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di perairan Danau Toba, Sumatera Utara, Senin (18/6) lalu. Ia menyayangkan, insiden tersebut telah merenggut korban jiwa dan ratusan lainnya masih belum ditemukan.

“Saya meminta kepada petugas di lapangan tak henti mencari saudara-saudara kita lainnya yang belum ditemukan. Mudah-mudahan mereka bisa ditemukan dalam keadaan selamat,” kata Bamsuet, sapaan akrabnya, dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Rabu (20/6).

Politisi Partai Golkar itu menegaskan, kejadian ini harus dijadikan pelajaran penting. Terlebih dari informasi yang beredar, KM Sinar Bangun tidak dilengkapi manifes penumpang dan barang.

“Manifes penumpang bukanlah hal yang bisa disepelekan. Keselamatan dalam hal apapun harus diutamakan, apalagi Danau Toba termasuk destinasi

wisata prioritas. Jangan sampai kejadian serupa berulang kembali baik di Danau Toba maupun di kawasan wisata lainnya,” tegasnya.

Bamsuet pun meminta Polri untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Ia mengingatkan, pengelola jasa transportasi maupun instansi terkait harus bertanggung jawab secara hukum dan moral.

“Kita tidak boleh meremehkan keselamatan. Jangan sampai nyawa saudara-saudara kita melayang percuma hanya karena kecerobohan,” tandas Bamsuet.

Diketahui, KM Sinar Bangun tenggelam sekitar dua kilometer setelah

kapal meninggalkan pelabuhan di Kabupaten Simalungun menuju Kabupaten Simanindo. Hingga Rabu (20/6) malam, tim gabungan SAR baru menemukan 21 korban, 18 orang selamat dan 3 ditemukan dalam keadaan tak bernyawa.

Sebelumnya, dalam konferensi persnya Rabu (20/6) Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, ada potensi KM Sinar Bangun tersebut kelebihan penumpang, indikasi tersebut ditandai dengan tidak adanya manifes.

Ia menjelaskan, seharusnya kapal yang berukuran 35 GT (gross tonnage) tersebut hanya berkapasitas 43 penumpang orang. Sementara berdasarkan data di Posko Simanindo, sebanyak 189 orang penumpang dilaporkan hilang. Namun, Budi menegaskan, segala kemungkinan akan diteliti lebih lanjut oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). ■ ann/sf

Terpilih Jadi Anggota DK PBB, Indonesia Harus Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, dengan terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), salah satu peran yang bisa ditunjukkan Indonesia adalah dengan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dukungan pada kemerdekaan Palestina yang selama ini diperjuangkan di berbagai forum pun dapat diberikan secara maksimal.

“ Dengan terpilihnya Indonesia sebagai DK PBB, Indonesia dapat memaksimalkan perannya, salah satunya memperjuangkan kemerdekaan Palestina, dan perdamaian dunia pada umumnya. Apalagi selama ini kita selalu menggaungkan akan kemerdekaan Palestina di berbagai forum. DPR pun melalui sidang antar parlemen juga memastikan Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina,” kata Taufik ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Sabtu (9/6).

Taufik menambahkan, Indonesia juga dapat memaksimalkan perannya dalam berbagai isu konflik dunia, salah satunya penanganan krisis Rohingya, Myanmar. Isu terkait terorisme, intoleransi, maupun isu-isu lain yang berdampak pada perdamaian dan keamanan dunia.

Hal lain yang harus menjadi perhatian Indonesia adalah pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un, di Singapura. Pasalnya, pertemuan kedua pemimpin negara ini berpengaruh pada keamanan dan perdamaian dunia.

“Peran Indonesia terhadap perdamaian dunia juga dapat semakin berpengaruh setelah terpilih sebagai Anggota DK PBB ini. Hal ini juga sesuai dengan amanat UUD 1945 kita, yang mengamanatkan Indonesia berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Semoga selama 2 tahun mendatang,

Indonesia semakin memberikan pengaruh pada perdamaian dunia,” harap politisi PAN itu.

Di sisi lain, Taufik memastikan selama ini DPR selalu mendukung upaya Indonesia untuk menjadi Anggota DK PBB dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir melalui diplomasi parlemen.

Duta Besar negara sahabat, kita selalu meminta negara-negara Anggota PBB untuk mendukung Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB,” imbuh Pimpinan DPR bidang Ekonomi dan Keuangan itu.

Indonesia terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB setelah mengantongi



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

Foto: Arief/hr

Misalnya dalam Sidang Inter Parliamentary Union (IPU) yang digelar di Jenewa, Swiss, Maret 2018 lalu. Delegasi DPR RI meminta negara yang hadir dalam sidang itu untuk mendukung Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB.

“Selain itu, dalam kesempatan DPR menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain, maupun saat DPR melakukan kunjungan ke parlemen negara sahabat, termasuk saat DPR menerima kunjungan

144 dari 190 keseluruhan suara. Indonesia juga telah memenuhi persyaratan minimal 2/3 dari anggota tetap PBB atau 127 suara. Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB menjadi keempat kalinya sepanjang sejarah Indonesia. Setelah sebelumnya menduduki kursi tersebut pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008. ■ sf

Indonesia Harus Berperan Pada Perdamaian Dunia

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Yudha mengapresiasi perjuangan keras Pemerintah Indonesia untuk bisa menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keberhasilan tersebut mengantarkan kembali Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB periode 2019-2020. Tercatat ini kali keempat Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB.



Foto: Arief/hr

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha

senantiasa menjalankan *second track diplomacy* untuk meminta dukungan kepada Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB.

“Ini bentuk sinergi kesuksesan

“ DPR menyambut baik atas hasil yang diperjuangkan Menlu RI di Majelis Umum PBB kemarin. Sebagai mitra, Komisi I mengapresiasi hal itu. Memang sudah sepatutnya Indonesia berperan aktif perdamaian dunia sesuai mandat Konstitusi kita,” papar Satya dalam keterangan persnya kepada Parleментарia, baru-baru ini.

Di sisi lain, Satya mengingatkan, hasil tersebut jangan sampai membuat pemerintah jumawa.

Menurutnya, dengan memegang peran penting tersebut, pemerintah harus tetap melakukan langkah-langkah strategis di kancah internasional dalam mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia sesuai amanah konstitusi.

Ia juga menambahkan, meski perjuangan garda depan ada di pihak pemerintah, namun andil lobi parlemen juga tak bisa diabaikan. Sebab, kata Satya, dalam setiap kunjungan luar negeri ke parlemen-parlemen negara sahabat, DPR

“ Banyak masyarakat tidak waspada pada kebijakan impor beras ini kecuali para petani. Hiruk pikuk memanasnya suasana demokrasi pergantian pemimpin daerah secara serentak, kemudian kejadian aksi teror kepada masyarakat di beberapa wilayah, hingga suasana puasa dimana masyarakat fokus beribadah, membuat adanya impor beras ini menjadi sunyi,” ucap Akmal dalam berita rilisnya kepada Parleментарia, Selasa (5/6).

Politisi PKS itu menyampaikan, masih bagus ada beberapa media dengan beberapa narasumber tetap memberikan informasi terkait kebijakan pemerintah akan impor beras tersebut, sehingga sekaligus menjadi kontrol pemerintah dalam bertindak.

“Persoalan data yang membuat keputusan impor beras sebagai permasalahan yang tidak ada ujungnya. Berpuluh tahun, silih berganti pemimpin mulai dari Presiden, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, hingga BPS tidak memberikan arah perbaikan bangsa ini menjadi lebih baik akan tata kelola data pangan sampai pada implementasi tata niaganya,” ujarnya.

Menurutnya, banyak sekali anomali kebijakan pangan Indonesia. Tindakan pemerintah yang berupa kebijakan pangan

Kebijakan Sunyi Impor Beras Rugikan Rakyat

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta kepada pemerintah agar jangan ada lagi sandiwara data dan kebijakan sunyi yang merugikan rakyat banyak. Akmal memaparkan, pada kutipan data pengadaan luar negeri Perum Bulog, jumlah beras impor yang masuk mencapai 532.526 ton per 23 Mei 2018. Kemudian pemerintah kembali menerbitkan izin impor beras. Tak ubahnya jilid pertama, kuota impor beras yang diberikan untuk jilid kedua ini juga sebanyak 500 ribu ton.



Foto: Jaka/hr

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin



DPR dan Pemerintah. Kami selalu menyampaikan pesan agar Indonesia mendapat dukungan untuk menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB,” imbuh politisi Partai Golkar ini.

Satya menambahkan, Indonesia mempunyai tugas berat di tengah melemahnya peran PBB di mata internasional dalam menjaga perdamaian dunia. Meskipun demikian, posisi strategis ini harus dimanfaatkan pemerintah secara optimal dengan menjadi negara yang aktif menyuarakan perdamaian dunia, khususnya isu kemerdekaan Palestina dan terciptanya ketertiban dunia yang selama ini terlibat sengketa dan perang sipil.

“Kita juga harus kritis, termasuk kepada Pemerintah Amerika Serikat agar meninjau ulang aksi mereka yang memindahkan Kedubesnya ke Yerusalem. Ini menunjukkan bahwa Indonesia punya wibawa di mata internasional di tengah turunnya kredibilitas PBB saat ini. Pemegang hak veto khususnya AS justru sering kali secara unilateral tidak mematuhi DK PBB,” tutup Satya. ■ **ann/sf**

hingga aplikasi lapangan seperti tidak memberi dampak berarti. Sebagai contoh, lanjutnya, kebijakan impor beras tapi tidak berdampak pada penurunan harga beras di pasaran. “Contoh lain, data menunjukkan stok pangan cukup, tapi kebijakan impor diam-diam dilakukan. Ini sungguh aneh dan tidak masuk akal,” tandasnya.

Akmal berharap, pemerintah terbuka terhadap situasi mengapa impor beras dilakukan dengan tidak adanya dampak penurunan harga. “Tapi yang lebih penting

Berpuluh tahun, silih berganti pemimpin mulai dari Presiden, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, hingga BPS tidak memberikan arah perbaikan bangsa ini menjadi lebih baik akan tata kelola data pangan sampai pada implementasi tata niaganya

adalah, pemerintah perlu berkomitmen agar memperbaiki kebijakan impor ini agar tidak menyakiti petani khususnya, dan menyakiti rakyat Indonesia pada umumnya,” tutup politisi dapil Sulsel ini. ■ **dep/sf**

Kepala BNPB Diminta Tingkatkan Program dan Sasaran Desa Tangguh Bencana

Komisi VIII DPR mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyusun perencanaan RAPBN 2019 dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) tahun 2019 agar dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Anggota Komisi VIII. Khususnya untuk meningkatkan program dan sasaran desa tangguh bencana, terutama di daerah yang termasuk kategori rawan bencana.

Desakan ini disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BNPB Willem Rampangilei dan jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6).

Mengingat banyaknya daerah bencana air, Komisi VIII juga menekankan kepada BNPB untuk meningkatkan pemanfaatan dan peran serta relawan bencana yang tersebar di seluruh Indonesia terkait kapasitas dan kualitasnya. Selain itu, BNPB juga diminta melakukan pemutakhiran peta risiko bencana dan melakukan kajian mengenai prediksi anggaran tanggap darurat bencana dalam berbagai situasi dan tingkatan bencana.

“Sejalan dengan itu, Komisi VIII juga mendesak BNPB untuk meningkatkan anggaran kesiapsiagaan dan mengantisipasi peningkatan dan luasnya daerah bencana. Juga perlunya membangun kerja sama dan peran swasta dalam kesiapsiagaan bencana melalui program desa tangguh bencana,” kata Ali Taher.

Dalam kesempatan ini, Kepala BNPB mengusulkan anggaran sebesar Rp694,625 miliar yang diarahkan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dan program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas. Selain itu diarahkan untuk program penanggulangan bencana dengan anggaran sebesar Rp 467,672 miliar. ■ **mp/sf**



Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong

Foto: Aandri/hr



Tim Kunker Komisi V DPR RI berdiskusi dengan pengelola Bandara Soekarno Hatta

Foto: Azka/hr

Komisi V Imbau Pengelola Soetta Antisipasi Penumpukan Kendaraan

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengatakan, selama mudik Lebaran penumpang Bandara Soekarno Hatta (Soetta) harus mendapatkan rasa aman dan nyaman. TNI dan Polri harus mengadakan patroli jalan kaki, guna menyapa pengunjung dan mengawasi mereka agar menciptakan suasana yang kondusif.

“Kami mengimbau agar TNI dan Polri agar bisa melakukan tindakan preventif untuk pengamanan mudik Lebaran 2018 di Bandara Soekarno Hatta. Hal ini agar bisa menciptakan rasa aman bagi pemudik di Bandara Soekarno Hatta, karena bandara ini merupakan bandara yang mobilitas penumpangnya tinggi,” kata Sigit saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Bandara Soetta, Cengkareng, Banten, Kamis (8/6).

Politisi PKS itu menambahkan, pihaknya juga meminta agar sistem drop penumpang di Terminal 1 Bandara Soetta tidak dipungut tiket masuk, agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di pintu masuk. Komisi V meminta kepada PT. Angkasa Pura selaku pengelola Bandara

Soetta untuk menyamakan perlakuan di pintu masuk Terminal 1 dengan Terminal lainnya.

“Karena penyebab penumpukan di Terminal 1 ialah setiap kendaraan yang masuk wajib mengambil tiket, walaupun itu hanya drop penumpang saja. Ini yang mengakibatkan penumpukan yang signifikan. Di Terminal 2 dan 3 hanya kendaraan yang parkir yang diwajibkan mengambil karcis parkir,” ungkapnya.

Sigit juga mengatakan untuk harga tiket pesawat yang cenderung melambung tinggi di setiap hari libur Lebaran, ia pun menyampaikan kepada Kementerian Perhubungan harus ada rumus yang jelas untuk tarif tiket batas bawah dan batas atas.

“Jangan sampai untuk penerbangan reguler ini harga tidak melambung tinggi di setiap hari libur Lebaran, seharusnya kalau dengan teori pasar disaat puncak seperti ini harusnya ada diskon, sesuai Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016. Kalau perlu bisa lebih murah lagi seperti hari-hari biasa. Jangan sampai momen lebaran ini menjadi sarana mengambil keuntungan sebesar-besarnya,” ujar politisi dapil Jatim itu.

Masih terkait tiket masuk Terminal 1 juga menjadi perhatian Anggota Komisi V DPR RI Rahmat Nasution Hamka. Ia mengimbau kepada PT. Angkasa Pura tidak memungut tiket masuk bagi kendaraan yang mengantar penumpang, khususnya selama arus mudik Lebaran tahun ini.

Selain itu, tambah politisi PDI Perjuangan itu, hal tersebut untuk mengurangi jumlah penumpukan kendaraan yang masuk Terminal 1 Bandara Soetta. Karena Terminal di bandara ini sudah melebihi kapasitas yang seharusnya, khususnya di Terminal 1.

“Kalau hanya mengantar, saya kira tidak perlu dipungut tiket masuk, kecuali kendaraan yang parkir di terminal-terminal bandara. Hal ini agar dapat mengurai penumpukan mobil di pintu masuk terminal,” ujar politis dapil Kalteng itu. ■ azk/sf

DPR Minta Bandara Minangkabau Dikelola Angkasa Pura II

Anggota Komisi V DPR RI Ade Rezki Pratama mengharapkan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di Padang, Sumatera Barat dikelola oleh PT. Angkasa Pura II. Pasalnya, bandara yang selesai dibangun pada tahun 2005 tersebut, beberapa tahun ini frekuensi penerbangan dan jumlah penumpangnya meningkat sangat signifikan.

“Selain perlu diperluas, pada akhirnya Bandara Minangkabau yang dibangun mulai tahun 2002 dan selesai tahun 2005, setelah beberapa tahun ini pertumbuhan penumpang dan frekuensi perkembangan tumbuhnya sangat signifikan. Harapan kami bandara ini dikelola oleh Angkasa Pura II,” papar Ade di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi V DPR dalam rangka meninjau kesiapan transportasi jelas arus mudik Lebaran 2018 di Padang,

beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut Politisi Gerindra ini meminta Kementerian Perhubungan agar mempersiapkan rencana-rencana pengembangan bandara ini. “Rencana yang sifatnya jangka panjang, kita berharap bandara ini nantinya terintegrasi baik dengan Stasiun Kereta Api Bandara yang saat ini sudah beroperasi”, tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, anggota dewan dapil Sumatera Barat II ini juga mengharapkan perlunya peningkatan pengembangan *runway*. Karena Bandara

Minangkabau ini termasuk bandara terpadat di Indonesia dan agar pesawat berbadan lebar bisa mendarat di bandara ini.

“Saat ini kami rasa, *runway* di bandara ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan padahal bandara ini adalah bandara internasional yang sudah melakukan penerbangan internasional diantaranya ke Singapura dan Malaysia, sementara penerbangan domestik pun frekuensi kian meningkat,” ungkapnya. ■ sc



Tim Kunker Komisi V DPR RI menyerap aspirasi dari penumpang Kereta Api Bandara di Padang, Sumbar



Selamat Datang
H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A.
Ketua DPR RI
dan
Meutya Viafa Hafid
Pimpinan Fraksi DPR RI
Anggota Komisi I
beserta rombongan
di Telkom Landmark Tower
Jakarta, 8 Juni 2018



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo didampingi sejumlah Anggota DPR RI memantau kesiapan jaringan telekomunikasi untuk menunjang akses publik pada Hari Raya Idul Fitri di Kantor Telkom, Jakarta. Foto : Jaka/hr



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Bogor guna membahas sejumlah persoalan yang ada di daerah, Jumat (22/6) Foto : Runi





Tim Komisi V DPR RI meninjau kesiapan sarana transportasi menjelang mudik lebaran 2018 di Sumbar, Lampung, Banten, dan Sultra beberapa waktu yang lalu.
Foto : Suci, Iwan, Azka



Tim Komisi VII mengunjungi Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat memantau kesiapan BBM dan listrik menjelang Hari Raya Idul Fitri beberapa waktu lalu. Foto : Suci, Ayu, Rizka



Sistem Zonasi PPDB Diharapkan Dukung Pemerataan Mutu Sekolah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menilai, sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan mampu menghilangkan dikotomi antara sekolah favorit dan non favorit. Hal ini dikarenakan dalam penerimaan siswa adalah zonasi atau jarak antara rumah dengan sekolah, sehingga dapat mendorong pemerataan mutu sekolah antar daerah, karena sebaran siswa yang berkualitas tidak hanya bertumpu pada sekolah yang dianggap favorit.

Sutan menuturkan sesuai dengan regulasi yang baru, yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB, kriteria PPDB adalah zonasi, bukan lagi nilai Ujian Nasional (Unas). Pola ini menurutnya memiliki kelebihan dalam menyeimbangkan sebaran siswa yang berkualitas di semua sekolah, namun juga butuh persiapan dari sekolah untuk menerapkan standar yang sama dengan sekolah unggulan.

“Yang menjadi kriteria pertama dalam penerimaan siswa baru adalah jarak. Pertimbangan kedua sekolah bisa menggunakan usia siswa. Dengan adanya sistem zonasi tersebut, anak didik yang berada di sekitar sekolah menjadi prioritas atau diutamakan dalam penerimaan siswa baru. Terlepas dari berapapun nilai Unasnya, nilai Unas menjadi pertimbangan terakhir,” kata Sutan dalam rilis yang diterima *Parlementaria*, Rabu (20/6).

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, dalam Pasal 14 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 diuraikan urutan seleksi masuk SMA, yakni berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi. Kemudian baru Surat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMP atau bentuk lain yang sederajat, dan prestasi di bidang akademik maupun non akademik yang diakui sekolah.

Ketentuan seleksi PPDB berbasis zonasi juga berlaku untuk siswa baru di jenjang SMP maupun SD. Khusus untuk SD pertimbangan pertama adalah usia peserta didik, baru setelah itu zonasi atau jarak rumah ke sekolah. Seleksi siswa baru jenjang SD juga tidak boleh menggunakan ujian baca, tulis, berhitung (calistung).

“Sehingga walaupun secara umum nilai Unas SMP tahun ini mengalami penurunan, secara garis besar tidak ada



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra

pengaruhnya pada PPDB untuk masuk jenjang SMA. Hal ini sejalan dengan rencana kerja Panitia Kerja (panja) DPR yang menerapkan standar nasional pendidikan yang sama di penjurur Tanah Air,” imbuh Sutan.

Namun kenyataan di lapangan, masih banyak orang tua yang belum paham mengenai sistem PPDB ini, khususnya di daerah pemilihannya di Jambi. Sebab ia mendapatkan kiriman tabel SMA negeri se-Jambi lengkap dengan zonasinya. Di satu sisi, ia juga menerima kiriman pesan berisi *passing grade* nilai Unas untuk masuk ke SMA negeri di Jambi.

“Masih banyak orang tua yang belum paham sistem PPDB, apakah menggunakan zonasi atau masih berbasis nilai Unas. Jika memang PPDB berbasis zonasi, maka

tidak perlu ada acuan nilai Unas. Artinya dengan nilai Unas berapapun, asalkan dekat dengan sekolah, maka bisa diterima,” tandas Sutan.

Politisi dapil Jambi itu berharap pemerintah daerah konsisten menerapkan ketetapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa PPDB berbasis zonasi atau jarak rumah ke sekolah. Sehingga tidak lagi membuat anak stress dan tidak ada lagi rebutan sekolah favorit.

“Selama ini, dengan sistem nilai Unas, banyak orang tua dari penjurur daerah mendaftarkan anaknya ke sekolah yang dicap sebagai sekolah favorit. Akibatnya ada anak yang dekat sekolah tidak diterima karena kalah bersaing dengan siswa lain yang rumahnya sangat jauh dari sekolah,” tutup Sutan. ■ sf

Foto: Ojje/hr

Novel Baswedan Terlalu Diistimewakan

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai terlalu diistimewakan. Ketika ia terluka matanya karena disiram air keras, DPR dan pemerintah sepakat memberi dukungan anggaran untuk pengobatannya. Namun, ketika aparat penegak hukum lainnya terluka dalam tugas, tak mendapat perhatian yang sama.

Ini adalah kritik Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani saat mengikuti rapat Komisi III dengan Pimpinan KPK, BNPT, LPSK, dan BNN di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6). DPR sempat menyetujui permohonan anggaran yang diajukan KPK untuk pengobatan mata Novel. Arsul lalu mempertanyakan, bagaimana perhatian pemerintah terhadap aparat lainnya, apakah mendapat keistimewaan seperti Novel.

“Beberapa waktu lalu ketika ada musibah Novel Baswedan, Ketua KPK minta permohonan dukungan anggaran. Musibah sebetulnya tidak bisa dianggarkan, tapi kami mendukung pengobatan dan perawatan Novel. Namun ketika aparat polisi dibacok oleh sindikat narkoba di Medan dan tidak mendapat

perlakuan yang sama, keluarga polisinya kirim SMS ke saya, apakah kami kurang penting dibandingkan Novel Baswedan,” ungkap Arsul.

Politisi PPP ini juga mencontohkan lainnya, ketika personel Densus 88 terluka dalam tugas, ia juga tak mendapat perhatian penuh seperti Novel. Bahkan, personel Densus 88 kabarnya hanya dirawat di kelas III RS. Polri. “Dia komplain, karena tidak mendapat perhatian seperti Novel. Negara harus melindungi aparat penegak hukumnya dengan lebih baik,” kilah Arsul.

Pada bagian lain, Arsul juga mengeritik KPK yang lamban menangani kasus-kasus besar. Misalnya, kasus RJ. Lino mantan Dirut Pelindo II yang belum jelas penyelesaiannya. Padahal, anggaran KPK tiga kali lipat lebih besar daripada Kejaksaan Agung dan Polri. Pimpinan KPK



Foto: Rumi/hr

Anggota Komisi II DPR RI Arsul Sani

sendiri kerap berkilah, kasus-kasus korupsi yang nilainya kecil selalu diusut, karena menjadi pintu masuk kasus-kasus korupsi besar. “Nyatanya setelah inkrah, tak ada kasus besar yang diungkap,” imbuhs Arsul. ■ mh/sf



Foto: Ojje/hr

Anggota Komisi VI Khilmi

BKPM Harus Lebih Waspada Terima Investasi Sektor SDA

Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi mengatakan bahwa ke depannya BKPM harus bersikap waspada dan lebih berhati-hati dalam menerima investasi yang terkait dengan sektor sumber daya alam di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sumber daya alam yang ada pada saat ini bisa habis dan punah.

“Kalau kita mengobrol investasi sumber daya alam tetapi tidak memperhitungkan industri-industri turunannya maka negara akan sangat dirugikan. Karena yang paling mahal adalah hasil produk industri turunan tersebut,” ucap Khilmi di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (06/6).

Ia menegaskan, kalau para investor itu tidak mau membangun industri hingga hilirnya, maka sebaiknya jangan diberikan izin. “BPKS Sabang dan BP Batam diharapkan bisa berkoordinasi dengan BKPM untuk dapat mengatur agar para investor itu mau membuat industri mulai

dari hulu sampai hilirnya, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi penduduk sekitar.

“Banyak investasi di bidang sumber daya alam yang masuk ke Indonesia, dan bahayanya adalah tanpa batasan. Dimana semua orang yang memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) bisa membuat smelter. Untuk ke depannya hal ini menjadi sangat berbahaya bagi negara kita,” ujarnya.

Dikatakannya, perkembangan BP Batam sejak dahulu hingga kini masih belum ada peningkatan, padahal setiap tahun diberi anggaran yang cukup besar.

“Untuk investasi yang berhubungan

dengan sumber daya alam harus dibuat kajian secara mendalam. Investor yang ingin berinvestasi di bidang yang berhubungan dengan sumber daya alam harus juga membuat industri hingga produk turunannya di Indonesia,” tandas politisi Fraksi Gerindra itu.

Jangan sampai baru setengah jadi sudah dibawa ke luar negeri. Hal itu menyebabkan nilai tambah untuk negara kita menjadi sangat kecil, sambungnya. “Apalagi orang yang diberikan izin oleh BKPM itu juga mendapatkan izin kuota impor. Kuotanya diimpor terus dipenuhi tetapi industri turunannya tidak pernah dibangun,” pungkasnya. ■ dep/sc

Pertamina Mutlak Siagakan BBM Premium

Anggota DPR RI Komisi VII Rofi' Munawar meminta PT. Pertamina melakukan persiapan ekstra guna mengantisipasi lonjakan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada arus mudik Lebaran tahun 2018. Lonjakan ini salah satunya dikarenakan distribusi BBM subsidi dibuka kembali oleh Pemerintah di daerah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).



Anggota Komisi VIII DPR RI Rofi' Munawar

Foto: Enro/hr

“Ketersediaan BBM Premium selain memberikan keringanan bagi pemudik, juga akan merubah pola konsumsi. Jika tidak diantisipasi sedini mungkin, bisa terjadi penumpukan dan antrian di SPBU yang menyediakan BBM jenis Premium,” kata Rofi' dalam rilisnya kepada Parlemen, Senin (11/6).

Pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sesuai penugasan Pemerintah, Pertamina akan menambah 571 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang kembali menjual BBM jenis Premium di wilayah Jamali.

Dengan adanya peraturan tersebut, alokasi volume penugasan menjadi 11,8 juta KL untuk seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan di peraturan sebelumnya, alokasi hanya 7,5 juta KL dengan wilayah

penugasan di luar Jamali.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan dengan terbitnya Perpres tersebut, memberi kelonggaran bagi distribusi premium bersubsidi di Jamali. Sejatinya pemerintah telah melakukan kebijakan populis dan pragmatis. Bukan tidak mungkin kebijakan perpres akan direvisi lagi pasca lebaran tergantung situasi dan kondisi di tengah masyarakat.

“Jika reformulasi sebuah kebijakan dirumuskan dengan pendekatan model populis seperti ini, sungguh akan merusak road map strategis penyediaan distribusi BBM secara nasional dan mengganggu kinerja operator pelaksana,” ulasnya.

Legislator asal dapil Jawa timur ini menjelaskan akan lebih baik bila sejak awal pemerintah membuat kebijakan BBM satu harga dan tersedia diseluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali, termasuk

wilayah Jamali. Karena secara faktual masyarakat kurang mampu di wilayah jamali pun masih sangat membutuhkan BBM jenis Premium.

Sebagaimana diketahui, Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak telah resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Dalam peraturan terbaru yang menggantikan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 ini menyebutkan, wilayah Jamali mulai mendapatkan tambahan alokasi premium. Sebelumnya, dalam Perpres 191 Tahun 2014 disebutkan, premium penugasan diberikan untuk seluruh wilayah Indonesia kecuali Jamali. ■ es/sf



Anggota BKSAP DPR RI Evita Nursanty

Foto: Ojle/hr

DPR Tetap Dukung Reformasi Dewan HAM PBB

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Evita Nursanty menyayangkan keluarnya Amerika Serikat (AS) dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Padahal, Dewan HAM PBB merupakan sebuah forum kerja sama multilateral dan sekaligus bukti komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan dan memajukan perlindungan HAM.

Luar Negeri Michael Richard Pompeo dan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley dalam konferensi pers Selasa sore waktu AS.

“Indonesia tentu sangat menyayangkan keputusan AS ini, apalagi dasarnya hanya karena pembelaan mereka terhadap Israel

dimana masyarakat dunia tentu masih memperdebatkan hal itu. Kita terus mendukung reformasi di Dewan HAM PBB dan juga badan PBB lainnya, tapi proses itu kan butuh dukungan, dan bukan dengan cara keluar,” kata Evita dalam rilisnya, Rabu (20/6).

Menurutnya, peran Dewan HAM PBB

Demikian disampaikan politisi PDI-Perjuangan ini, menanggapi keputusan keluarnya AS dari Dewan HAM PBB yang diumumkan Menteri

Ketua Baleg Ungkap Hambatan Proses Legislasi

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menerima kunjungan Pemuda Pancasila DKI Jakarta dan BEM Kampus se-DKI dan OKP se-DKI Jakarta. Dalam pertemuan tersebut dia menjelaskan tentang proses legislasi yang terjadi di DPR. Supratman mengingatkan kembali tentang Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang mengatur tentang kewenangan membentuk UU ada pada DPR, tapi pembahasannya harus bersama dengan pemerintah.



Foto: Azka/hr

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas saat menerima kunjungan Pemuda Pancasila dan BEM Kampus se-DKI Jakarta

penting karena menjadi harapan bagi masyarakat lemah di seluruh dunia untuk mendapat perhatian bagi perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM.

Dengan keluarnya AS, lanjut Evita, masyarakat dunia akan mempertanyakan kembali komitmen negara adidaya itu yang ingin disebut sebagai pemimpin global yang mempromosikan dan melindungi HAM semua orang di seluruh dunia, termasuk untuk perdamaian dan juga kesejahteraan dunia.

“Apalagi sebelum keluar dari Dewan HAM PBB, AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump juga sudah menyatakan keluar dari proses atau mekanisme multilateral antara lain dari Paris Agreement (Iklim), UNESCO, Global Compact Migration, Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) soal nuklir Iran,” ujarnya.

Diakui Evita, kinerja Dewan HAM PBB memang belum sempurna. Namun, proses reformasi seperti

yang dibutuhkan beberapa badan PBB lainnya, seperti Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, justru membutuhkan komitmen politis dan semangat kerja sama multilateralisme dari anggota PBB.

Karena itu, Evita mendukung langkah pemerintah Indonesia bersama-sama negara lainnya di dunia, untuk terus berkontribusi dan bekerja sama menegakkan dan memajukan perlindungan HAM, melalui kerja sama multilateralisme sesuai mandat Dewan HAM, termasuk memperkuat kinerja Dewan HAM PBB.

“Kami mendukung Kementerian Luar Negeri RI untuk menegakkan dan mengembangkan perlindungan HAM melalui kerja sama multilateralisme dan memperkuat kinerja Dewan HAM PBB,” kata politisi yang juga Anggota Komisi I DPR RI itu. ■ ann/sf

“Pasal 5 Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa kewenangan membentuk undang-undang itu, dulu kan di tangan Presiden, setelah reformasi di tangan DPR, tetapi pembahasannya harus bersama-sama dengan pemerintah. Kalau dalam pembahasan pemerintah tidak hadir, *enggak* jadi undang-undang,” papar Supratman di ruang rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (8/6).

Sebelumnya dalam dialog, para peserta kunjungan mempertanyakan tentang, kenapa proses legislasi selalu banyak hambatan. Menurut ketentuan UU bahwa setelah DPR mengirimkan surat tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Presiden, maka dalam waktu 60 hari Presiden wajib mengeluarkan Surat Presiden dalam bentuk penugasan kepada menteri, siapa yang ditugaskan dalam membentuk undang-undangnya dilampiri dengan daftar infentarisir masalah terhadap sebuah RUU.

“Kalau DPR yang mengusulkan, itu artinya DIM-nya atau Daftar Inventarisasi Masalahnya harus dari pemerintah. Kalau pemerintah yang mengusulkan sebuah RUU, inisitif pemerintah, maka DIM-nya harus dari DPR. Pasti jadi lebih banyak, karena ada 10 Fraksi di DPR,” jelas politisi Partai Gerindra itu.

Dia pun mencontohkan, saat ini ada dua RUU yang masih terhambat, yakni RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) dan RUU Pertembakauan. Surat Presiden sudah keluar, tapi DIM tidak ada. Tentang RUU ASN DPR telah berjuang kepada seluruh tenaga honorer di Indonesia supaya bisa terangkat menjadi PNS. “Tapi pemerintah tidak mengeluarkan DIM. Apa yang mau kita bahas di DPR, ini supaya publik tahu, teman-teman tahu bahwa masalah itu bukan di sini,” ujar Supratman.

Kedua, RUU tentang Pertembakauan, sama nasibnya juga seperti RUU ASN. “Karena sudah 60 hari terpenuhi dikeluarkan Supresnya ditugaskan kepada menteri terkait untuk membahas bersama dengan parlemen. Tetapi DIM-nya tidak ada, kalau DIM-nya tidak ada dan pemerintah tidak hadir, ya mau *bikin* apa,” ungkap Supratman. ■ eko/sf



Foto: Rumi/hr

Sekjen DPR RI melantik pejabat dan pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI

Sekjen DPR Lantik Pejabat dan Pegawai Setjen dan BK DPR

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melantik 9 pejabat, 18 pegawai fungsional, dan 1 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6). Ia yakin, seluruh pejabat dan pegawai yang dilantik, dapat menjalankan tugas dan amanah dengan baik.

“ Saya secara resmi melantik bapak dan ibu untuk menduduki jabatan struktural dan fungsional. Saya percaya saudara-saudara dapat menjalankan tugas dan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya,” ucap Indra dalam sambutan upacara pelantikan.

Indra menjelaskan, pelantikan ini

dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, baik karena purna bakti maupun kebutuhan organisasi. Ia menilai, rotasi dan mutasi pejabat dan pegawai ini merupakan penyegaran dan energi baru bagi lingkungan unit kerja yang akan ditempatkan guna peningkatan kualitas kinerja yang semakin baik.

Ia menambahkan, pejabat dan pegawai yang dilantik, dipilih berdasarkan berbagai pertimbangan dari pimpinan seperti *track record* kinerja. Mengingat DPR sebagai lembaga yang tidak pernah lepas dari sorotan media maupun masyarakat, Indra berharap seluruh peserta dapat mengerahkan kemampuan dan potensi yang dimiliki, meningkatkan kualitas kinerja, melaksanakan pekerjaan dengan *zero mistake*.

“DPR ini kan selalu menjadi sorotan. Ibaratnya ada jarum jatuh, tapi yang diberitakan dibesar-besarkan. Jadi sedikit kesalahan akan jadi perbincangan. Untuk itu, berikan pelayanan sebaik-baiknya pada pimpinan khususnya pejabat struktural. Lakukanlah dengan *zero mistake*. Dan itu akan menjadi ukuran pada kinerja kita juga. Promosi, dan mutasi itu dipertimbangkan berdasarkan *track record*,” pungkaskan Indra.

Sebagai penutup, Indra menyampaikan pesan khusus untuk

pejabat di Bagian Pengamanan Dalam (Pamdal) agar memperhatikan kedisiplinan anggotanya, meningkatkan pengamanan guna mencegah dan melindungi seluruh pejabat dan pegawai DPR RI dari ancaman dan kesempatan pelaku kejahatan. Mengingat, maraknya pemberitaan bahwa DPR menjadi salah satu lembaga sasaran ancaman terorisme.

“Saya harap teman-teman Pamdal tidak lalai dalam menjalankan tugas. Pimpinan Pamdal tolong diperhatikan betul kedisiplinan anak buah. Demi menjaga keamanan ke depannya kita akan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak keamanan secara lebih serius,” pesan Indra.

Adapun 9 pejabat yang dilantik tersebut adalah Kepala Bagian Pengamanan Dalam (Pamdal) Tamamudin, Kepala Subbagian Pelaksanaan Pengamanan Rumah Jabatan Pimpinan dan Anggota Bagian Pamdal Martaya, dan Kepala Subbagian Pelaksanaan Pengamanan Kompleks DPR RI Bagian Pamdal Didi.

Berikutnya, Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Akuntabilitas Keuangan dan Kerumahtanggaan (Korakker) Achmad Agus Thomy, Kepala Subbagian Kerumahtanggaan Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Korakker Toto Rasmono, dan Kepala Subbagian Tata Usaha Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Korakker Beny Rahabandiyosa Sabri.

Kemudian, Kepala Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Mardi Harjo, Kepala Subbagian Rapat Bagian Sekretariat BAKN Aji Nurhadi Wibowo, dan Kepala Subbagian Tata Usaha Bagian Sekretariat BAKN Murni Elok Pertiwi.

Sementara 18 pegawai fungsional yang dilantik diantaranya adalah 3 Pranata Humas Muda yakni Andam Perwitasari, Indah Kurniasari, dan Dewi Maheswari Pramesti. Kemudian 1 Auditor Madya yakni Lieke Tielung. Berikutnya 9 Peneliti Madya yakni Rasbin, Trias Palupi Kurnianingrum, Dina Martiany, Edmira Rivani, Monika Suhayati, Venti Eka Satya, Anih Sri Suryani, Dinar Wahyuni, dan Denico Doly.

Pegawai fungsional berikutnya yang dilantik adalah 4 Pustakawan Muda yakni Magfira, Desti Ariesti Rohim, Djati Ardjani, Indira Nadya Paramitha, dan 1 Perekam Medis Penyelia yakni Hanifah Hanum. Dan 1 Pegawai Negeri Sipil yang dilantik sebagai Pranata Humas Pertama yakni Klarce Grice Pattipeme. ■ apr/sf



Wakil Ketua MKD DPR RI Sarifuddin Sudding bersama Wakapolda Sumsel

Foto: Agung/hr

Pembahasan RUU KUHP Libatkan Berbagai Pihak

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Sarifuddin Sudding memastikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sudah melalui pembahasan yang cukup alot dan telah melibatkan berbagai pihak.

“Masukan-masukan yang disampaikan oleh *stakeholder* telah diakomodir secara sedemikian rupa dalam KUHP. Karena kita semua sadar bahwa aturan aturan yang ada dalam hukum pidana harus juga mengakomodir nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat,” kata Sudding usai pertemuan dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang, Sumsel, Kamis (7/6).

Sementara terkait perilaku penyimpangan seksual, dalam hal ini LGBT, politisi Partai Hanura itu menegaskan, perilaku itu tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial, nilai keagamaan, dan nilai-nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat, maka patut dan wajib dimasukkan ke dalam KUHP.

“Begitu pula yang menyangkut dengan masalah penghinaan terhadap presiden. Penghinaan Presiden tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sebagai negara yang beradab, menjunjung tinggi sopan santun serta menghargai antara satu dengan yang lain, tindakan menghina atau mencaci maki adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan,” pungkas politisi dapil Sulteng itu.

Masih terkait pasal tentang penghinaan terhadap Presiden Anggota MKD DPR RI Ahmad Zacky Siradj mengatakan bahwa kritik terhadap Presiden seharusnya lebih terhadap kinerjanya, bukan kepada pribadinya. “Begitu juga kritik kepada lembaga-lembaga negara lainnya, kalau kita ingin mengkritik lebih kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut,” ucapnya.

Selain itu, Zacky juga menegaskan bahwa pasal pengaturan KPK dalam RUU KUHP bukanlah untuk melemahkan institusi KPK. Menurutnya justru hal itu untuk memperkuat KPK. “Karena kita mengadopsi atau memasukkan Undang-Undang KPK itu sendiri dalam RUU KUHP yang tujuannya adalah untuk memperkuat dan menegaskan kewenangan dari KPK,” tutur politisi Partai Golkar itu.

Dalam KUHP perlu ada aturan-aturan atau payung hukum bagi KPK, sehingga payung hukum itu dapat memperkuat status dan kewenangan KPK. “KPK tidak perlu khawatir, karena hal itu tidak akan mengurangi kewenangannya,” komitmen politisi dapil Jawa Barat itu.

Berkaitan dengan tujuan kunjungan kerja yang dilakukan oleh MKD DPR RI ini, Zacky menjelaskan bahwa MKD DPR RI ingin melakukan sosialisasi yang terkait dengan berbagai ketentuan-ketentuan mengenai MKD. “Sosialisasi ini penting karena wilayah kita adalah bukan wilayah hukum, tetapi wilayah etika,” tutupnya. ■ as/sf

Kejahatan Narkoba Lebih Berbahaya Dibanding Terorisme



Foto bersama Delegasi DPR RI bersama seluruh delegasi AIPACODD

Foto : Dok BKSAP/hr

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyatakan bahwa perang melawan narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan perang melawan terorisme. Hal itu ditegaskannya saat pertemuan pertama AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD) yang berlangsung pada 18-21 Juni 2018 di Singapura.

“Kejahatan narkoba lebih berbahaya dari kejahatan teroris. Hal ini disebabkan karena korban jiwa yang semakin meningkat setiap harinya dan juga dapat merusak generasi muda dan kehancuran negara serta bangsa,” tandas Nurhayati.

Didampingi dua anggota delegasi DPR RI lainnya, yaitu Fadel Muhammad (F-PG) dan Achmad Farihal (F-PPP), Nurhayati selaku Ketua Delegasi DPR RI menyerukan perang besar terhadap narkoba dan menuntut seluruh elemen yang ada di ASEAN untuk bergerak melawan kejahatan terorganisir yang bersifat lintas negara tersebut.

Dihadapan seluruh anggota delegasi yang hadir, Nurhayati menyampaikan tentang laporan kinerja (country report) Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menyebutkan bahwa aparat penegak hukum Indonesia telah berhasil menangkap kejahatan narkoba disertai barang bukti seperti Shabu (methamphetamine) 4,71 ton, Ganja (cannabis) 151,22 ton dan Ekstasi 2,940.748 butir dan 627,84 kilogram.

Hal ini merupakan bukti keseriusan aparat penegak hukum dalam melawan kejahatan narkoba dan komitmen hukum di Indonesia yang tegas dan keras terhadap jaringan sindikat narkoba.

“BNN juga melakukan pendekatan *demand reduction* melalui langkah-langkah yang ditempuh, sebagai upaya untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dengan menyasar kaum muda (anak-anak, remaja, pelajar dan mahasiswa) yang merupakan target pasar jaringan sindikat narkoba,” papar Nurhayati.

Terkait harapan ASEAN dibidang *drug trafficking* serta *rehabilitation and prevention*, Nurhayati berharap adanya komitmen, semangat, dan tekad yang

kuat dalam mengatasi permasalahan yang tanpa batas itu. Memerangi narkoba sampai tuntas menjadi prioritas bersama.

“Oleh karena itu dukungan seluruh anggota ASEAN sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Marilah berjuang bersama, bekerja sekuat tenaga, menjadikan negara kita bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba,” imbuah politisi Fraksi Demokrat itu.

AIPACODD sendiri merupakan transformasi dari AIPA Fact Finding Committee to Combat Drug Menace (AIFOCOM) dengan tujuan untuk mengambil tindakan konkret guna efisiensi dan koordinasi yang lebih baik terhadap ancaman narkoba di seluruh kawasan ASEAN dan juga untuk memperkuat peran dan mandatnya sebagai alat parlemen untuk memerangi ancaman narkoba.

Pertemuan pertama AIPACODD di Singapura tersebut menghasilkan dua Resolusi yang akan diajukan untuk adopsi pada SIUM ke-39 AIPA yaitu Resolution on Securing A Drug-Free ASEAN Community for Future Generation dan Resolution on the Terms of Reference for the AIPACODD. Pertemuan kedua AIPACODD akan dilaksanakan tahun 2019 di Chiang Mai, Thailand. ■ dep/sf



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua Fahri Hamzah menghadiri acara peluncuran buku "Things That Live Within" karya Adinda Saraswati di Kawasan Senayan, Rabu (6/6). Foto : Jaka



Rapat Kerja Komisi DPR RI dengan Kementerian LHK dipimpin Edhy Prabowo terkait rencana pelepasan lahan hutan di sejumlah daerah, Rabu (6/6). Foto : Jaka



Rapat Kerja Bangkar DPR RI dengan Menko Bidang Kemaritiman, Perekonomian, Polhukam dan PMK dipimpin Ketua Azis Syamsuddin terkait pembahasan RKA K/L Empat Kemenko dalam RAPBN TA. 2019, Kamis (7/6) Foto : Andri



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



**Mau motor
Zaman now?**

**IKUTI LOMBA
KRITIK TERBAIK DPR**

KIRIM MEME & ESSAY
MEME (gambar, karikatur, video)
ESSAY maksimal 500 kata

MASA PENGIRIMAN KARYA:
19 APRIL - 15 AGUSTUS 2018
PENGUMUMAN 29 AGUSTUS 2018

PEMENANG UTAMA: Motor Zaman Now
Juara I Rp 10 juta, Juara II, Rp 7 juta,
Juara III Rp 5 juta

KIRIM KE: SAAT PENGUMUMAN
DILANGSUNGKAN LOMBA STAND UP COMEDY



lombakritikterbaikDPR@gmail.com



lombakritikterbaikDPR@yahoo.com



[@LombaKritikTerbaikDPR](https://www.instagram.com/LombaKritikTerbaikDPR)



[@LombaKritikDPR](https://twitter.com/LombaKritikDPR)



[@lombakritikterbaikDPR](https://www.facebook.com/lombakritikterbaikDPR)